

Analisis Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Publik dalam Pembiayaan Pendidikan

Aura Vista Prasasti

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

auraprasasti.ofc@gmail.com

PERIODE ARTIKEL

Masuk : 08-03-2005

Direview: 17-03-2025

Diterima:28-04-2025

KATA KUNCI

Manajemen
Keuangan Publik;
Pembiayaan
Pendidikan;
Transparansi;
Akuntabilitas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip manajemen keuangan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMP Muhammadiyah 9 Nagreg. Penelitian ini dilakukan untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak sekolah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, observasi terbatas terhadap proses pembiayaan pendidikan, serta studi dokumentasi berupa laporan keuangan dan catatan administrasi. Data dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada prinsip manajemen keuangan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Muhammadiyah 9 Nagreg telah menerapkan prinsip transparansi melalui penyampaian informasi keuangan kepada pemangku kepentingan, prinsip akuntabilitas melalui struktur pengelolaan dan mekanisme pelaporan keuangan, serta prinsip efisiensi dan efektivitas melalui perencanaan anggaran berbasis kebutuhan dan pemanfaatan dana yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi keterbatasan akses dan pemahaman informasi keuangan, akuntabilitas yang cenderung administratif, serta belum optimalnya pengukuran efektivitas penggunaan dana. Penelitian ini terbatas pada satu lembaga pendidikan sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Keterbatasan pendekatan kualitatif juga memengaruhi pengukuran efektivitas penggunaan dana secara kuantitatif. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai penerapan prinsip manajemen keuangan publik pada lembaga pendidikan Islam tingkat sekolah menengah pertama, serta memperkaya kajian tata kelola keuangan pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman.

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek strategis dalam penyelenggaraan pendidikan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan operasional lembaga pendidikan serta pencapaian tujuan pembelajaran. Pengelolaan keuangan yang tidak terencana, tidak transparan, dan tidak akuntabel berpotensi menimbulkan ketidakefisienan penggunaan sumber daya, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta menghambat peningkatan mutu pendidikan (Afkari, 2025; Windy, 2025). Oleh karena itu, pengelolaan pemberian pendidikan menuntut penerapan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam konteks sektor publik, manajemen keuangan publik menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) (Aslindah & Mulawarman, 2022; Mardiasmo, 2021). Transparansi mengharuskan keterbukaan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan, akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan dana, sementara efisiensi dan efektivitas berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Khofi & Wafi, 2025; Nisa et al., 2024). Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi penting dalam pengelolaan pemberian pendidikan, mengingat pendidikan merupakan sektor publik yang melibatkan kepentingan masyarakat secara luas.

Lembaga pendidikan Islam memiliki karakteristik tersendiri dalam pengelolaan keuangan karena tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan teknis, tetapi juga pada nilai-nilai keislaman seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab (Qodir, 2024; Rahmawati et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, lembaga pendidikan Islam sering menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dengan tuntutan manajemen keuangan modern yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana prinsip manajemen keuangan publik diterapkan dalam konteks lembaga pendidikan Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek administratif atau teknis, serta belum banyak mengkaji penerapan prinsip manajemen keuangan publik secara komprehensif, khususnya pada lembaga pendidikan Islam tingkat sekolah menengah pertama (Adzkia et al., 2024; Prastiwi et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam memperkaya kajian manajemen keuangan pendidikan Islam dengan menempatkan prinsip-prinsip keuangan publik sebagai kerangka analisis utama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMP Muhammadiyah 9 Nagreg, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Artikel ini disusun dalam beberapa bagian, yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan yang menyoroti implikasi temuan penelitian dan rekomendasi untuk pengelolaan keuangan pendidikan yang lebih optimal.

Metode

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 9 Nagreg, Kabupaten Bandung, pada tahun 2025. Subjek penelitian adalah lembaga SMP Muhammadiyah 9 Nagreg dengan informan yang meliputi kepala sekolah, bendahara sekolah, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, yang dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi terbatas, dan studi dokumentasi terhadap laporan keuangan, catatan pembukuan, serta bukti transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan lembar observasi disusun berdasarkan indikator prinsip manajemen keuangan publik (Sugiyono, 2013). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan pengelompokan data berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian (Sugiyono, 2013).

Hasil

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penyajian hasil difokuskan pada penerapan prinsip manajemen keuangan publik dalam pengelolaan pemberian pendidikan di SMP Muhammadiyah 9 Nagreg, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

1. *Transparansi Pengelolaan Keuangan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Muhammadiyah 9 Nagreg telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan pemberian pendidikan. Transparansi tersebut ditunjukkan melalui penyampaian informasi keuangan kepada pemangku kepentingan, khususnya terkait pembayaran SPP dan penggunaan dana sekolah. Penyampaian informasi ini menjadi bentuk keterbukaan sekolah dalam mengelola pemberian pendidikan. Informasi keuangan kepada guru dan tenaga kependidikan disampaikan melalui rapat internal serta media komunikasi sekolah, sedangkan kepada orang tua siswa disampaikan melalui rapat rutin yang dilaksanakan setiap semester. Selain itu, sekolah menyusun rekapitulasi penggunaan dana secara berkala sebagai bentuk dokumentasi dan upaya menjaga keterbukaan pengelolaan keuangan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa akses terhadap informasi keuangan masih bersifat terbatas. Informasi yang diterima oleh guru dan orang tua siswa belum sepenuhnya sama, baik dari segi kedalaman maupun cakupan, sehingga transparansi yang diterapkan cenderung bersifat selektif dan disesuaikan dengan kepentingan masing-masing pihak.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di SMP Muhammadiyah 9 Nagreg tercermin dari adanya struktur pengelolaan keuangan yang jelas. Bendahara sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan, sementara setiap penggunaan dana dilakukan berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan dan memperoleh

persetujuan dari kepala sekolah. Mekanisme ini menunjukkan adanya pembagian tugas dan wewenang yang terstruktur dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Selain pembagian peran yang jelas, akuntabilitas juga ditunjukkan melalui pencatatan keuangan yang dilakukan secara tertib. Pembukuan keuangan disusun secara manual dan digital serta dilengkapi dengan bukti transaksi, sehingga setiap pengeluaran dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara administratif. Lebih lanjut, sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana kepada orang tua siswa melalui forum rapat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Praktik ini menunjukkan adanya upaya sekolah untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.

3. Efisiensi Penggunaan Dana Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan dana pendidikan di SMP Muhammadiyah 9 Nagreg tercermin dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Setiap kegiatan sekolah serta pengadaan sarana dan prasarana direncanakan berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan dana tidak bersifat berlebihan. Perencanaan tersebut menjadi dasar dalam mengendalikan pengeluaran agar sesuai dengan kemampuan keuangan sekolah. Selain itu, seluruh pengeluaran dicatat secara rinci sebagai bagian dari upaya pengendalian biaya dan pencegahan pemborosan. Pencatatan keuangan yang tertib memungkinkan sekolah memantau penggunaan dana secara lebih sistematis dan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Pengelolaan dana yang berbasis kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa sekolah berupaya memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk menunjang kegiatan pendidikan. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip efisiensi dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, di mana sumber daya keuangan dimanfaatkan secara tepat guna untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan.

4. Efektivitas Penggunaan Dana Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana pendidikan di SMP Muhammadiyah 9 Nagreg telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Pengelolaan pembiayaan pendidikan berperan dalam peningkatan fasilitas sekolah, kesejahteraan guru, serta kelancaran proses pembelajaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa dana pendidikan tidak hanya digunakan sesuai dengan perencanaan anggaran, tetapi juga diarahkan pada kegiatan yang mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan secara umum.

Meskipun demikian, efektivitas penggunaan dana pendidikan belum sepenuhnya diukur secara sistematis. Evaluasi yang dilakukan masih bersifat umum dan lebih menekankan pada keterlaksanaan program dibandingkan pada pencapaian hasil dan dampak penggunaan dana. Kondisi ini menyebabkan hubungan antara alokasi anggaran dan capaian tujuan pendidikan belum tergambarkan secara jelas dan terukur. Keterbatasan dalam pengukuran efektivitas tersebut menunjukkan perlunya pengembangan indikator kinerja yang lebih terstruktur dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Dengan adanya indikator yang jelas dan terukur, sekolah dapat menilai secara lebih objektif sejauh mana penggunaan dana berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan, sekaligus memperkuat penerapan prinsip efektivitas dalam manajemen keuangan publik.

5. Tantangan dalam Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip manajemen keuangan publik di SMP Muhammadiyah 9 Nagreg masih menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat struktural dan kultural. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses dan pemahaman pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan sekolah. Meskipun sekolah telah berupaya menyampaikan informasi keuangan kepada pihak terkait, tingkat pemahaman orang tua dan masyarakat terhadap laporan keuangan masih relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan transparansi yang telah diupayakan belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan keuangan sekolah.

Tantangan lainnya berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang masih berfokus pada aspek administratif. Akuntabilitas lebih banyak dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban pelaporan dan pencatatan keuangan, sementara aspek pertanggungjawaban berbasis kinerja dan hasil belum dikembangkan secara optimal. Akibatnya, hubungan antara penggunaan anggaran dan capaian tujuan pendidikan belum sepenuhnya terlihat secara jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas masih bersifat prosedural, belum berorientasi pada evaluasi dampak penggunaan dana terhadap mutu pendidikan.

Selain itu, keterbatasan sistem pendukung dan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan sekolah juga menjadi tantangan yang signifikan. Pengelolaan keuangan masih dilakukan secara sederhana dengan dukungan sistem informasi yang terbatas, sehingga berpotensi mempengaruhi ketepatan, efisiensi, dan ketertelusuran data keuangan. Di sisi lain, kompetensi pengelola keuangan sekolah dalam memahami prinsip manajemen keuangan publik dan pengelolaan keuangan berbasis kinerja masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan dana dapat dilakukan secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Tantangan berikutnya adalah belum optimalnya pengukuran efektivitas penggunaan dana pendidikan. Sekolah belum memiliki indikator kinerja yang terstruktur untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Akibatnya, efektivitas pembiayaan pendidikan lebih banyak dinilai secara kualitatif dan subjektif, bukan berdasarkan ukuran yang terukur dan sistematis. Kondisi ini menjadi kendala dalam penerapan prinsip manajemen keuangan publik secara menyeluruh, karena efektivitas merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pengelolaan keuangan sektor publik.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMP Muhammadiyah 9 Nagreg telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan publik, khususnya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, meskipun dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah keterbatasan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan adanya upaya sekolah untuk menyelaraskan praktik pengelolaan keuangan dengan tata kelola sektor publik yang menekankan keterbukaan, pertanggungjawaban, serta pemanfaatan sumber daya secara optimal. Dalam konteks pendidikan, pengelolaan keuangan yang baik menjadi penting karena sekolah berperan sebagai pengelola dana publik yang harus mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Transparansi pengelolaan keuangan diwujudkan melalui penyampaian informasi keuangan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal sekolah. Praktik ini sejalan dengan pandangan Oriol (2025) yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi anggaran merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang baik. Transparansi memungkinkan terbangunnya kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi lembaga pendidikan dalam mengelola dana yang bersumber dari masyarakat. Transparansi keuangan di sektor pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan mencegah penyalahgunaan anggaran (Afkari, 2025; Rusmiyati et al., 2025). Dengan demikian, temuan penelitian ini menguatkan pandangan bahwa penerapan transparansi dalam pengelolaan pemberian pendidikan merupakan fondasi penting bagi praktik manajemen keuangan publik di sekolah, meskipun masih diperlukan penguatan agar keterbukaan informasi tersebut dapat diakses dan dipahami secara lebih luas oleh seluruh pemangku kepentingan.

Akan tetapi, transparansi yang diterapkan masih bersifat selektif dan belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam proses pengawasan keuangan. Transparansi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan akuntabilitas apabila tidak disertai dengan mekanisme pemahaman dan partisipasi publik (Nuriyawati et al., 2025; Safitri et al., 2025). Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, transparansi seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai perwujudan nilai amanah dan kejujuran dalam pengelolaan dana pendidikan, sebagaimana ditekankan dalam konsep etika keuangan Islam (Kholid & Wahyunik, 2025; Rahmawati et al., 2025; Windasari,

2024). Selain transparansi, aspek akuntabilitas juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas, pencatatan administrasi yang tertib, serta pelaporan penggunaan dana kepada pihak terkait. Praktik ini mencerminkan konsep akuntabilitas sektor publik yang menekankan kewajiban pengelola untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada pemberi mandat (Andriana, 2025; Kewo, 2024). Kejelasan struktur pengelolaan dan mekanisme pelaporan menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya memenuhi tuntutan akuntabilitas formal dalam pengelolaan pemberian pendidikan. Meskipun demikian, akuntabilitas yang diterapkan masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis kinerja dan hasil. Temuan ini sejalan dengan penelitian Prastiwi (2025) yang menyatakan bahwa banyak organisasi sektor publik telah memenuhi tuntutan akuntabilitas prosedural, tetapi belum optimal dalam mengaitkan penggunaan anggaran dengan capaian kinerja.

Dalam konteks pendidikan, akuntabilitas yang efektif seharusnya tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menilai sejauh mana pemberian pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan hasil pendidikan (Bush & Glover, 2014). Akuntabilitas pemberian dengan demikian perlu dipahami sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang berorientasi pada kinerja (*performance-based accountability*), di mana penggunaan anggaran dapat ditelusuri secara jelas dan dikaitkan langsung dengan capaian program pendidikan yang dilaksanakan. Transparansi dalam pelaporan keuangan serta keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan, seperti komite sekolah dan orang tua peserta didik, menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan.

Dari sisi efisiensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya mengalokasikan dana pendidikan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia. Praktik ini sejalan dengan pandangan (Mulyati et al., 2025) yang menegaskan bahwa efisiensi dalam pemberian pendidikan berkaitan dengan kemampuan lembaga memaksimalkan hasil pendidikan dengan

sumber daya yang terbatas. Efisiensi tidak semata-mata diukur dari kecilnya biaya yang dikeluarkan, tetapi dari ketepatan alokasi anggaran terhadap program-program yang berdampak langsung pada proses dan kualitas pembelajaran (Wahyudin, 2021; Winarsih, 2025). Perencanaan anggaran yang relatif terarah membantu sekolah menghindari pemborosan dan memastikan bahwa dana digunakan untuk mendukung kegiatan inti pendidikan, seperti pengembangan kompetensi guru, penyediaan sarana pembelajaran, serta pelaksanaan kegiatan akademik yang relevan dengan kebutuhan peserta didik.

Namun, keterbatasan sistem informasi keuangan dan sumber daya manusia pengelola keuangan menjadi faktor yang berpotensi menghambat optimalisasi efisiensi pembiayaan pendidikan. Keterbatasan tersebut dapat berdampak pada kurang maksimalnya proses perencanaan, pencatatan, serta pengawasan penggunaan anggaran, sehingga berisiko menurunkan ketepatan alokasi dana. Dalam perspektif pendidikan Islam, efisiensi juga memiliki dimensi normatif yang berkaitan dengan prinsip kesederhanaan dan larangan pemborosan (israf), sehingga pengelolaan dana pendidikan dituntut tidak hanya bersifat hemat, tetapi juga tepat sasaran dan bernilai maslahat bagi seluruh warga sekolah (Hidayat & Machali, 2012). Prinsip ini menegaskan bahwa efisiensi keuangan harus selaras dengan nilai etika dan tujuan pendidikan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Efektivitas penggunaan dana pendidikan dalam penelitian ini ditunjukkan oleh kontribusi pembiayaan terhadap penyediaan fasilitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan pendidik, serta kelancaran proses pembelajaran. Penggunaan dana yang diarahkan pada kebutuhan strategis sekolah menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan telah berperan dalam mendukung pencapaian tujuan institusional (Ahmad & Rochimah, 2025; Mulyati et al., 2025; Suryaman & Trisnawati, 2025). Dengan demikian, efektivitas pembiayaan tidak hanya tercermin dari terserapnya anggaran, tetapi dari sejauh mana penggunaan dana tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dan capaian pembelajaran peserta didik.

Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwa pengukuran efektivitas penggunaan dana belum didukung oleh indikator kinerja yang terstruktur dan

terukur. Kondisi ini memperkuat temuan Zamrud (2025) yang menyatakan bahwa banyak lembaga pendidikan masih kesulitan mengaitkan input keuangan dengan *output dan outcome* pendidikan secara sistematis. Dalam konteks pendidikan Islam, efektivitas pembiayaan pendidikan idealnya diukur tidak hanya dari capaian akademik, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembentukan karakter, moral, dan spiritual peserta didik sebagai tujuan pendidikan yang holistik. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip manajemen keuangan publik di lembaga pendidikan Islam telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal.

Tantangan yang dihadapi mencerminkan dinamika umum pengelolaan pembiayaan pendidikan di sektor publik, khususnya dalam mengintegrasikan tuntutan tata kelola modern dengan nilai-nilai keislaman. Sejalan dengan pandangan Abrellian (2025) akuntabilitas dan transparansi yang efektif memerlukan sinergi antara sistem, budaya organisasi, dan nilai-nilai etis yang dianut oleh pengelola. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya diskursus tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan Islam serta membuka peluang pengembangan model manajemen keuangan pendidikan yang lebih kontekstual, akuntabel, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan prinsip manajemen keuangan publik di lembaga pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari peran kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan pembiayaan, membangun budaya transparansi, serta memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan berjalan secara konsisten. Hal ini sejalan dengan temuan Bush & Glover (2014) yang menegaskan bahwa kepemimpinan pendidikan berperan penting dalam menjembatani kebijakan manajerial dengan praktik operasional di tingkat sekolah. Kepemimpinan yang visioner dan berintegritas menjadi faktor kunci dalam menginternalisasi prinsip tata kelola keuangan yang baik ke dalam budaya organisasi sekolah.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Penerapan prinsip manajemen keuangan publik tidak hanya bergantung pada ketersediaan aturan dan prosedur, tetapi juga pada

kepemimpinan yang efektif, partisipasi pemangku kepentingan, serta kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Temuan ini memperluas pemahaman bahwa penguatan tata kelola pemberian pendidikan Islam perlu dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan pengelolaan pendidikan di era modern.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan pemberian pendidikan di SMP Muhammadiyah 9 Nagreg telah menerapkan prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan publik, meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan telah diwujudkan melalui mekanisme pelaporan dan pencatatan administrasi yang tertib, namun masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan. Dari sisi efisiensi dan efektivitas, penggunaan dana pendidikan telah diarahkan pada kebutuhan prioritas sekolah dan mendukung kelancaran proses pembelajaran, meskipun pengukuran kinerja dan capaian hasil belum dilakukan secara terstruktur dan terukur.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pengelolaan pemberian pendidikan di lembaga pendidikan Islam memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan, penguatan peran kepemimpinan sekolah, serta perluasan partisipasi pemangku kepentingan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pendidikan. Temuan penelitian ini berimplikasi pada pentingnya pengembangan model pengelolaan pemberian pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pencapaian kinerja dan nilai-nilai keislaman sebagai dasar pengelolaan yang akuntabel dan bermakna. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan prinsip manajemen keuangan publik pada konteks lembaga pendidikan Islam yang lebih beragam serta menggunakan indikator kinerja yang lebih terukur guna memperkaya temuan dan generalisasi hasil penelitian.

Referensi

- Abrellian, J. R., & Handayani, N. (2025). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 14(4).
- Adzkia, R., Anastasya, F., Awallyah, N. S., & Kusumaningrum, H. (2024). Manajemen keuangan sekolah: transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. *Al-Gafari: Manajemen Dan Pendidikan*, 2(3), 278–289.
- Afkari, S. G. (2025). Manajemen Risiko Dalam Keuangan Lembaga Pendidikan: Strategi Mitigasi, Transparansi Anggaran, Dan Keberlanjutan Finansial. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 3(4), 18–25.
- Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). STRATEGI TATA KELOLA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN USAI EFISIENSI ANGGARAN: Systematic Literature Review. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 300–310.
- Andriana, D. (2025). *Akuntabilitas Publik*. Deepublish.
- Aslindah, A., & Mulawarman, W. G. (2022). Membangun masa depan melalui manajemen keuangan pendidikan yang efektif. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 2(2), 65–74.
- Bush, T., & Glover, D. (2014). School leadership models: What do we know? *School Leadership & Management*, 34(5), 553–571.
- Hidayat, A., & Machali, I. (2012). *Pengelolaan pendidikan: konsep, prinsip, dan aplikasi dalam mengelola sekolah dan madrasah*. Kaukaba.
- Kewo, C. L. (2024). *Manajemen Kinerja Akuntansi Sektor Publik, Teori dan Aplikasi*. CV. Azka Pustaka.
- Khofi, M. B., & Wafi, I. (2025). Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan di Sekolah: Implementasi dan Dampaknya. *Hatta: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 3(1), 1–12.
- Kholid, A., & Wahyunik, S. (2025). Pengaruh Akuntabilitas dalam Manajemen Pendidikan Islam: Studi tentang Transparansi dan Profesionalisme. *JIEM: Journal Of Islamic Education and Management*, 5(2), 10–23.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Mulyati, I., Raswati, D., Mulyani, S., & Sara, D. (2025). Penerapan Sistem Keuangan Sekolah Yang Efektif Dalam Perspektif Manajemen Sistem Pembelajaran. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(2), 278–286.
- Nisa, V., Rachmawati, A. A., Janah, E. U., & Trihantoyo, S. (2024). Analisis Prinsip Akuntabilitas Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Sekolah. *Refleksi: Jurnal Riset Dan Pendidikan*, 2(2), 69–82.
- Nuriyawati, N., Maryanto, M., & Abdullah, G. (2025). PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA BOS TERHADAP MUTU PENDIDIKAN. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 143–151.
- Oriol, A. M., & Ferreira, R. (2025). *The future of fiscal transparency*.
- Prastiwi, P. I., Ririanti, E. V., Lestari, D. P., & Aisah, E. N. (2025). The Implementation of Financial Management in Supporting Educational Operational Activities at SMP IT Insan Cendekia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Qodir, M. F. (2024). Manajemen Keuangan Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan*

- Muhammadiyah Kramat Jati*, 5(2), 466–471.
- Rahmawati, A., Azril, I., Agustiana, A. Y., Andriesgo, J., Gustia, A., Mukhlisin, M., & Wahyuni, S. E. (2025). PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 10(2), 299–317.
- Rusmiyati, L., Abdullah, R., Zulaikha, S., & Takdir, M. (2025). Transformasi Manajemen Keuangan Sekolah di Era Digital: Kajian Literatur terhadap Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di Indonesia: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5372–5380.
- Safitri, N., Alwi, M., & Albar, A. (2025). Akuntabilitas Keuangan Sekolah sebagai Upaya Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Wonomulyo. *Jurnal E-Business Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar*, 5(1), 89–93.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Suryaman, M., & Trisnawati, A. (2025). Kajian manajemen pembiayaan pendidikan dasar: Strategi, tantangan, dan implikasinya terhadap mutu sekolah. *Jurnal Tahsinia*, 6(4), 560–573.
- Wahyudin, U. R. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas)*. Deepublish.
- Winarsih, P. (2025). Efisiensi Anggaran dan Pembiayaan Pendidikan terhadap Kualitas Lulusan Universitas Islam Negeri di Indonesia. *Al-Hasib: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 1–14.
- Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 10–25.
- Windy, P. S. (2025). Tantangan dan Solusi Dalam Menegelola Keuangan Sekolah Secara Efektif. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan/ E-ISSN: 3062-7788*, 2(1), 350–355.
- Zamrud, Q. T. (2025). Strategi Manajerial Dalam Meningkatkan Efisiensi Sumber Daya Dilembaga Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 5(2).